

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 762

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 736).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 887.233.226.516,- bertambah sejumlah Rp. 143.692.137.259,- sehingga menjadi Rp. 1.030.925.363.775,-

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 891.204.209.512,-	
b. Bertambah	Rp. <u>33.112.292.491,-</u>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 924.352.502.003,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 887.233.226.516,-	
b. Bertambah	Rp. <u>143.692.137.259,-</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.030.925.363.775,-
		_____ (-)
	Defisit setelah perubahan	(Rp. 106.572.861.772,-)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. <u>116.897.590.060,-</u>	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 116.897.590.060,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. <u>10.324.728.288,-</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 10.324.728.288,-
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 106.572.861.772,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 93.431.204.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>23.872.429.000,-</u>	(+)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 117.303.633.000,-
	b. Dana perimbangan	

b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 396.016.544.512,-
2) Bertambah	<u>Rp. 103.078.903.603,-</u> ⁽⁺⁾
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.499.095.448.115,-
 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 411.504.282.004,-
2) Bertambah	<u>Rp. 21.910.200.022,-</u> ⁽⁺⁾
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.433.414.482.026,-
b. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 40.115.250.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 11.787.650.000,-</u> ⁽⁺⁾
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 51.902.900.000,-
c. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 35.597.150.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 5.405.350.000,-</u> ⁽⁺⁾
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 5.510.033.634,-
d. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 1.510.033.634,-</u> ⁽⁺⁾
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 5.510.033.634,-
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 82.464.926.721,-
2) Bertambah	<u>Rp. 17.312.358.585,-</u> ⁽⁺⁾
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 99.777.285.306,-
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.157.090.618.719,-
2) Bertambah	<u>Rp. 33.750.794.384,-</u> ⁽⁺⁾
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.190.841.413.103,-
c. Belanja modal	

c. Belanja modal	
1) Semula	Rp.156.460.999.072,-
2) Bertambah	<u>Rp.52.015.750.634,-</u> (+)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.208.476.749.706,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 116.897.590.060,-	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp.116.897.590.060,-</u> (+)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.116.897.590.060,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.324.728.288,-	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 10.324.728.288,-</u> (+)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 10.324.728.288,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 116.897.590.060,-	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 116.897.590.060,-</u> (+)
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.116.897.590.060,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 7.500.000.000,-	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 7.500.000.000,-</u> (+)
Jumlah penyertaan modal (investas) daerah setelah Perubahan	Rp. 7.500.000.000,-
b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 2.824.728.288,-	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 2.824.728.288,-</u> (+)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp. 2.824.728.288,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dari dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
pada tanggal, 4 September 2007

BUPATI SERANG

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 4 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/ttd

R.A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 762